

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses penanganan sampah yang baik dapat menciptakan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga, maka dari itu penanganan sampah harus memiliki sistem kerja yang baik pula. Suatu kota yang berkembang dan tumbuh dengan baik adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara kondisi lingkungan dan kepadatan penduduk yang akan diakomodasi di dalamnya (Romlah et al., 2020).

Perkotaan umumnya ditandai dengan kepadatan permukiman. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, permintaan akan lahan permukiman semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk juga berdampak pada peningkatan volume sampah (Awaluddin, 2020).

Sampah domestik adalah jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, seperti sisa makanan, kertas, plastik, logam, kain, dan barang-barang bekas lainnya. Sampah domestik juga sering disebut sebagai sampah rumah tangga atau sampah dapur (Dih Kab. Ponorogo, 2023).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai 3.214.791 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021-2022 sebesar 1,8%. Selain itu, sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memiliki 6 kawasan industri serta 7.339 perusahaan yang berdiri.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi (Bupati Kabupaten Bekasi, 2010). UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II merupakan wilayah yang paling memiliki banyak jumlah penduduk dibanding wilayah lainnya yang meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Tambun Utara, Sukawangi, dan Tambelang.

Kecamatan Tambun Selatan menjadi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 431.547 penduduk atau 13,42 % dari total penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 sehingga memiliki potensi penghasil timbulan sampah terbanyak pula.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kabupaten Bekasi mengantongi timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah di provinsi Jawa Barat (Cindy Mutia Annur, 2023). Namun, jumlah volume sampah per harinya belum mampu terangkut semua dengan menggunakan metode pola pengangkutan sampah saat ini. Mengacu pada peraturan, metode HCS dan SCS merupakan metode pola pengangkutan sampah yang lazim diterapkan. Kedua sistem pengangkutan tersebut berdasarkan wadah bak sampah yang dapat berpindah dan tidak dapat berpindah.

Kendala lain seperti pola pengangkutan sampah yang kurang efektif ketika melakukan proses pemindahan sampah sehingga melebihi batas waktu jam kerja operasional. Pengangkutan sampah tersebut berbanding lurus dengan jumlah ketersediaan armada pengangkut sampah yang berakibat pada kebutuhan pelayanan transportasi sampah guna menyokong proses pengangkutan sampah domestik. Pengangkutan sampah menjadi syarat penting dalam terciptanya timbulan volume sampah yang rendah. Sistem pengangkutan yang berkaitan dengan pola pergerakan angkutan sampah harus dapat terintegrasi.

Evaluasi sistem pengangkutan sampah ini diharapkan mampu mendorong sistem pengangkutan sampah menjadi lebih baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan murah. Penelitian ini hendak mengevaluasi sistem pengangkutan sampah di Kabupaten Bekasi lebih jauh lagi berdasarkan informasi yang didapat dari pengamatan langsung maupun data-data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi guna meningkatkan pelayanan angkutan sampah menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Evaluasi Sistem Pengangkutan Sampah Domestik di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus: UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II)"**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan beberapa identifikasi masalah terkait pengangkutan sampah domestik di Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

1. Dengan jumlah penduduk sebesar 3.214.791 jiwa dan 6 kawasan industri besar serta 7.339 perusahaan yang berdiri, menyebabkan volume timbulan sampah domestik Kabupaten Bekasi semakin tinggi sehingga diperlukan sistem pengangkutan sampah yang baik.
2. Belum mampu mengangkut jumlah volume sampah 359 ton/hari dengan metode pengangkutan yang ada.
3. Belum memadainya jumlah dan kondisi sarana maupun prasarana angkutan sampah di UPTD Wilayah II Kabupaten Bekasi.
4. Pola pengangkutan sampah yang belum efektif dalam mengatur jangka waktu yang melebihi batas jam kerja operasional.
5. Penentuan jenis kendaraan angkutan sampah yang belum disesuaikan dengan kebutuhan armada angkutan sampah di UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bekasi.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting sistem pengangkutan sampah domestik di Kabupaten Bekasi, khususnya UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II?
2. Bagaimana sistem pengangkutan sampah domestik di Kabupaten Bekasi, khususnya UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II menggunakan metode HCS (*Hauled Container System*) dan SCS (*Stationary Container System*)?
3. Bagaimana perbandingan metode HCS (*Hauled Container System*) dan SCS (*Stationary Container System*) pengangkutan sampah domestik di Kabupaten Bekasi, khususnya UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II?
4. Bagaimana penentuan jumlah dan jenis kendaraan angkutan sampah domestik di Kabupaten Bekasi, khususnya UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi eksisting sistem pengangkutan sampah domestik di UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis sistem pengangkutan sampah domestik di UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi dengan metode HCS (*Hauled Container System*) dan SCS (*Stationary Container System*).
3. Menganalisis perbandingan sistem pengangkutan sampah domestik di UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi.
4. Menganalisis kebutuhan jumlah dan jenis kendaraan angkutan sampah domestik di UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis membuat batasan-batasan penelitian agar penelitian yang dikaji dapat lebih fokus dan terperinci:

1. Keadaan dan kondisi sampah domestik yang akan dikaji meliputi UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi.
2. Daerah pelayanan pengangkutan sampah mengacu pada yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, khususnya UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah.
3. Truk pengangkut hanya melalui jalan-jalan yang ditetapkan di wilayah yang termasuk UPTD Wilayah II Pengelolaan Sampah.
4. Penelitian ini tidak mengkaji mengenai rute, penjadwalan, dan biaya operasional kendaraan angkutan sampah.
5. Kendaraan yang dikaji hanya terbatas pada kendaraan truk.